

Relasi Kuasa dan Eksklusi Ruang dalam Pembangunan Pariwisata Eksklusif di Labuan Bajo: Perspektif Michel Foucault

Felix Riondi Sugar^{1*}, Emanuel Boli Manuk², Sales Agung³, Agustinus Duli Ujang⁴,
Kristoforus Mage⁵, Charlos Mario Y.B. Makung⁶, Fransiskus Richardo Sukun⁷,
Benyamin Chintyano Meo⁸, Yosef Kurniawan Lagur⁹, Heribertus Jebaru¹⁰

¹⁻¹⁰ Prodi Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

*Penulis Korespondensi: felikssugar@gmail.com¹

Abstract. *Exclusive tourism development in Labuan Bajo is part of the government's strategy to enhance tourism competitiveness, attract investment, and promote economic growth. However, this development also generates various problems related to local communities' access to space, resources, livelihoods, and the distribution of economic benefits. This study aims to analyze power relations and spatial exclusion in tourism development in Labuan Bajo from Michel Foucault's perspective. The study employs a qualitative approach using a literature review method. Data were obtained from books, journal articles, research findings, reports, and other relevant sources. The data were analyzed using Foucault's concepts of power relations, power/knowledge, discourse, governmentality, and resistance. The findings indicate that tourism development in Labuan Bajo does not only produce economic and physical transformations, but also produces and regulates space through power relations. These relations operate through development discourse, regulations, conservation policies, investment practices, and tourism industry standards. Such mechanisms have the potential to limit local communities' access to space and resources and to reinforce inequalities in the distribution of development benefits. Therefore, tourism development in Labuan Bajo can be understood not merely as an economic development process, but also as a process involving power, spatial control, and social relations that influence the position of local communities.*

Keywords: *Exclusive Tourism; Labuan Bajo; Michel Foucault; Power Relations; Spatial Exclusion.*

Abstrak. Pengembangan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing pariwisata, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan akses masyarakat lokal terhadap ruang, sumber daya, mata pencaharian, serta distribusi manfaat ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa dan eksklusi spasial dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dari perspektif Michel Foucault. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur. Data diperoleh dari buku, artikel jurnal, hasil penelitian, laporan, dan berbagai sumber relevan lainnya. Data dianalisis menggunakan konsep relasi kuasa, kuasa/pengetahuan, wacana, governmentality, dan resistensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo tidak hanya menghasilkan perubahan ekonomi dan fisik, tetapi juga memproduksi dan mengatur ruang melalui relasi kuasa. Relasi tersebut bekerja melalui wacana pembangunan, regulasi, kebijakan konservasi, investasi, serta standar industri pariwisata. Mekanisme tersebut berpotensi membatasi akses masyarakat lokal terhadap ruang dan sumber daya serta memperkuat ketimpangan dalam distribusi manfaat pembangunan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata di Labuan Bajo dapat dipahami tidak hanya sebagai proses pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai proses yang melibatkan kuasa, penguasaan ruang, dan relasi sosial yang memengaruhi posisi masyarakat lokal.

Kata kunci: Eksklusi Ruang; Labuan Bajo; Michel Foucault; Pariwisata Eksklusif; Relasi Kuasa.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu strategi pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing pariwisata di tingkat global. Pada 15 Juli 2019, pemerintah menetapkan lima kawasan sebagai destinasi pariwisata superprioritas, salah satunya Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (Sugar, et al., 2026). Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, menarik investasi, memperkuat infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan

ekonomi masyarakat lokal. Pemerintah juga menempatkan pengembangan pariwisata sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan UMKM, dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat (Kamenparekraf, 2024).

Namun, pembangunan pariwisata tidak selalu menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat. Di balik pertumbuhan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan jumlah wisatawan, masyarakat lokal menghadapi berbagai perubahan dalam ruang hidup, akses terhadap sumber daya, mata pencaharian, serta kehidupan sosial dan budaya. Penelitian dari Kiwang & Arif, (2020), misalnya, menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Labuan Bajo telah memengaruhi kenyamanan masyarakat, penggunaan ruang privat, serta pola kehidupan dan budaya lokal. Persoalan serupa juga terlihat dalam penguasaan tanah, perubahan mata pencaharian, dan persaingan tenaga kerja yang dapat menempatkan sebagian masyarakat lokal pada posisi yang kurang menguntungkan dalam proses pembangunan pariwisata (Bagung, 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan siapa yang memiliki kewenangan untuk menentukan arah pembangunan, siapa yang memiliki akses terhadap ruang dan sumber daya, serta siapa yang memperoleh manfaat dari proses tersebut. Dengan demikian, pembangunan Labuan Bajo perlu dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan relasi antarpelaku dengan kepentingan dan posisi kekuasaan yang berbeda.

Perspektif Michel Foucault dapat digunakan untuk memahami persoalan tersebut. Foucault memandang kuasa bukan sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau kelompok tertentu, melainkan sebagai relasi yang bekerja melalui institusi, pengetahuan, wacana, norma, kebijakan, dan praktik sosial (Kebung, 2018). Kuasa juga bersifat produktif karena dapat membentuk pengetahuan, menentukan apa yang dianggap benar dan normal, serta membentuk perilaku dan subjek tertentu (Kebung, 2016). Dalam konteks pembangunan pariwisata, perspektif ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana wacana tentang pariwisata berkualitas, eksklusif, konservasi, investasi, dan pembangunan digunakan untuk membentuk serta mengatur ruang dan kehidupan masyarakat.

Sejumlah penelitian mengenai pariwisata Labuan Bajo telah membahas dampak pembangunan, partisipasi dan adaptasi masyarakat lokal, keberlanjutan, serta distribusi manfaat pariwisata. Namun, penelitian yang secara khusus melihat pembangunan pariwisata eksklusif sebagai proses relasi kuasa dan produksi ruang masih relatif terbatas. Celah tersebut menjadi dasar penelitian ini untuk menggunakan perspektif Michel Foucault dalam menganalisis bagaimana kuasa bekerja melalui wacana pembangunan, pengetahuan, kebijakan, regulasi, dan praktik pemerintahan dalam membentuk serta mengatur ruang pariwisata di

Labuan Bajo. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan konsep relasi kuasa, wacana, *power/knowledge*, dan *governmentality* dengan proses produksi ruang pariwisata serta posisi masyarakat lokal di dalamnya. Penelitian ini penting dilakukan karena pesatnya pembangunan Labuan Bajo tidak hanya menghasilkan perubahan ekonomi dan fisik, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap ruang, sumber daya, dan peluang ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kritis mengenai bagaimana pembangunan pariwisata eksklusif membentuk distribusi kuasa dan ruang antara pemerintah, investor, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, laporan lembaga, serta sumber relevan lainnya yang membahas pembangunan pariwisata Labuan Bajo, masyarakat lokal, produksi ruang, dan pemikiran Michel Foucault. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan konsep relasi kuasa, *power/knowledge*, wacana, *governmentality*, dan resistensi Foucault. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan, pengetahuan, wacana pembangunan, regulasi, investasi, dan praktik pariwisata membentuk penguasaan ruang serta memengaruhi posisi masyarakat lokal dalam pembangunan pariwisata di Labuan Bajo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relasi Kuasa dan Eksklusi Ruang dalam Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo

Labuan Bajo telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi pariwisata unggulan Indonesia yang mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai belahan dunia. Daya tarik kawasan ini tidak terlepas dari keberadaan satwa endemik Komodo, keindahan ekosistem bawah laut, serta gugusan pulau-pulau kecil dengan panorama alam yang khas. Beragam potensi tersebut menjadikan Labuan Bajo semakin diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara (Sugar, et al., 2026). Seiring dengan meningkatnya popularitas destinasi ini, jumlah kunjungan wisatawan juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan Kompas, sepanjang tahun 2023 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo mencapai 423.847 orang (Taris & Prasetya, 2024). Peningkatan jumlah kunjungan tersebut tentu menjadi kabar positif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, terdapat persoalan yang perlu

diperhatikan, terutama bagi kelompok masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan dalam mengakses dan memperoleh manfaat dari perkembangan pariwisata di Labuan Bajo.

Pada 2019, sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui respons masyarakat Labuan Bajo terhadap perkembangan pembangunan pariwisata di wilayah tersebut (Kiwang & Arif, 2020). Dalam kajian mereka menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata mulai menimbulkan sejumlah dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah berkurangnya kenyamanan masyarakat akibat meningkatnya aktivitas dan keramaian pariwisata, yang pada saat yang sama turut memengaruhi keberadaan ruang-ruang privat masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan berkembangnya industri hiburan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah hotel, restoran, kafe, dan bar yang menawarkan berbagai bentuk hiburan, termasuk pertunjukan dan pesta musik. Selain perubahan pada lingkungan sosial dan ruang kehidupan masyarakat, perkembangan pariwisata juga turut memengaruhi pola kehidupan dan kebiasaan masyarakat lokal (Sugar, et al., 2026). Perubahan tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian, penggunaan bahasa dalam interaksi sehari-hari, serta semakin berkurangnya praktik dan ekspresi budaya lokal. Dengan demikian, perkembangan pariwisata tidak hanya membawa perubahan pada aspek ekonomi dan fisik wilayah, tetapi juga berimplikasi terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat (Kiwang & Arif, 2020).

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pesatnya pembangunan pariwisata di Labuan Bajo belum sepenuhnya memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Meskipun dalam berbagai proses sosialisasi pemerintah dan pelaku usaha menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata, termasuk pengembangan pariwisata eksklusif, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, realitas yang dihadapi sebagian masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembangunan yang dikemukakan dan manfaat yang dirasakan di tingkat lokal (Sugar, et al., 2026). Alih-alih memperoleh manfaat yang sebanding dengan pertumbuhan sektor pariwisata, sebagian masyarakat justru menghadapi berbagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang diterapkan untuk mendukung percepatan pengembangan Labuan Bajo. Pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta kemudahan perizinan bagi kegiatan investasi, telah mendorong pertumbuhan usaha dan berbagai proyek pariwisata. Namun, proses tersebut juga menimbulkan persoalan terkait akses masyarakat terhadap ruang, sumber daya, dan kesempatan ekonomi (Sugar, et al., 2026). Dengan demikian, manfaat ekonomi dari pembangunan pariwisata perlu dilihat secara kritis karena pertumbuhan investasi

dan pembangunan fisik tidak selalu berbanding lurus dengan pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mengenai distribusi manfaat dan beban pembangunan. Di satu sisi, pembangunan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai ekonomi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata. Di sisi lain, sebagian masyarakat lokal harus menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan ruang hidup mereka (Bagung, 2022). Situasi ini membuka pertanyaan penting mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan, siapa yang memperoleh akses dan manfaat terbesar dari proses tersebut, serta bagaimana posisi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan ruang hidup mereka.

Di balik pesatnya pembangunan dan promosi pariwisata di Labuan Bajo, terdapat berbagai persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat lokal. Perkembangan pariwisata eksklusif di kawasan tersebut tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membawa perubahan terhadap akses masyarakat terhadap ruang hidup dan sumber-sumber penghidupan (Sugar, et al., 2026). Persoalan tersebut salah satunya disoroti oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). JATAM menilai bahwa arah pembangunan pariwisata di Labuan Bajo belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal (et al., 2026). Koordinator JATAM, Melky Nahar, mengungkapkan bahwa masyarakat Pulau Komodo telah mengalami berbagai perubahan dalam kehidupan dan mata pencaharian sejak kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Masyarakat menghadapi pembatasan terhadap sejumlah aktivitas yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan mereka, seperti berburu dan bertani (Sugar, et al., 2026). Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk beralih ke sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian. Selain pembatasan aktivitas di daratan, pengaturan kawasan konservasi juga mencakup wilayah laut yang berada di sekitar kawasan tersebut. Berbagai ketentuan konservasi (DA, 2022). Kemudian membatasi ruang gerak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Dalam perkembangan selanjutnya, perubahan tersebut juga berkaitan dengan transformasi struktur ekonomi masyarakat akibat berkembangnya industri pariwisata. Sebagian masyarakat diarahkan untuk memperoleh penghidupan melalui sektor jasa pariwisata, seperti bekerja di hotel, menjadi pemandu wisata, atau terlibat dalam aktivitas ekonomi pendukung lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata dan kebijakan konservasi

tidak hanya mengubah kondisi fisik suatu kawasan, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat menggunakan ruang, mengakses sumber daya, dan menentukan pilihan mata pencaharian (DA, 2022).

Dalam kasus lain, jurang kesenjangan kepemilikan agraria pun semakin melebar. Para pengusaha dengan mudah merogoh kocek untuk menguasai lokasi-lokasi strategis di Labuan Bajo. Sementara itu, masyarakat lokal sebagai pemegang hak atas tanah mesti berjuang mempertahankan properti mereka di tengah himpitan ekonomi dan kebijakan politik pembangunan. Akibatnya, di beberapa tempat di Labuan Bajo kepemilikan properti seperti tanah dan bangunan telah berpindah tangan ke para investor (DA, 2022). Hal ini berimbas pada fenomena privatisasi ruang publik yang mulai marak terjadi di Labuan Bajo. Belum lagi muncul oknum-oknum mafia tanah yang setiap saat menjadi ancaman bagi masyarakat lokal yang mempunyai tanah. Oknum-oknum mafia tanah tersebut lahir tak terkendali sejalan dengan naiknya harga tanah dan bangunan di Labuan Bajo. Mereka mengincar tanah-tanah milik masyarakat lokal yang belum memiliki sertifikat kepemilikan (Bagung, 2022).

Selain itu, masalah lain yang ditimbulkan akibat pembangunan pariwisata eksklusif Labuan Bajo adalah seputar tenaga kerja. Perlu diakui bahwa sumber daya manusia masyarakat lokal masih tergolong rendah. Ketatnya persaingan dunia kerja membuat banyak masyarakat lokal kalah bersaing, sehingga banyak lapangan-lapangan pekerjaan di bidang industri pariwisata mesti didominasi oleh tenaga kerja dari luar daerah. Hal ini semakin diperparah dengan jargon Pariwisata Eksklusif yang otomatis juga menuntut kemampuan “eksklusif” dari para pekerjanya. Realitas ini telah melahirkan penderitaan baru bagi masyarakat lokal di Labuan Bajo. Pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo bukannya memecahkan masalah paksis yang dihadapi masyarakat lokal di sana, malah sebaliknya menambah beban penderitaan baru yang mesti dipikul oleh masyarakat. Atau, bila meminjam kata-kata dari Arturo Escobar katanya; “Pembangunan adalah pencetus masalah bukan hanya ketika ia gagal membangun, tetapi juga ketika ia sukses membangun” (Pinem, 2020). Dengan demikian, kebijakan pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo dapat dinilai kurang tepat dan bijaksana.

Relasi Kuasa, Wacana, dan Pengetahuan dalam Pemikiran Michel Foucault

Pemikiran mengenai kuasa merupakan salah satu pusat penting dalam karya Michel Foucault. Namun, kuasa dalam pemikiran Foucault tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sesuatu yang dimiliki oleh individu, kelompok, kelas sosial, atau institusi tertentu. Kuasa bukan hanya berada di tangan negara atau penguasa yang kemudian digunakan untuk menekan pihak yang dikuasai (Kebung, 2019). Sebaliknya, Foucault memahami kuasa sebagai sesuatu yang

beroperasi melalui relasi sosial, hadir dalam berbagai hubungan antarmanusia, dan bekerja melalui praktik, institusi, pengetahuan, wacana, serta mekanisme pengaturan perilaku (Kebung, 1997).

Dengan demikian, kuasa tidak semata-mata bersifat represif. Kuasa juga bersifat produktif, karena menghasilkan pengetahuan, membentuk kategori-kategori sosial, memproduksi norma, membentuk cara berpikir, serta turut membentuk individu sebagai subjek tertentu. Dalam hubungan inilah Foucault memperkenalkan keterkaitan erat antara kuasa dan pengetahuan (*power/knowledge*). Menurutnya, tidak terdapat hubungan kuasa tanpa pembentukan suatu bidang pengetahuan yang berkaitan dengannya, dan tidak ada pengetahuan yang tidak sekaligus mengandaikan serta menghasilkan relasi kuasa (Suyono et al., 2001). Pandangan tersebut membawa Foucault pada persoalan mengenai wacana (*discourse*). Wacana tidak sekadar dipahami sebagai kumpulan kata, teks, atau pembicaraan mengenai suatu objek, melainkan sebagai praktik yang secara historis menentukan apa yang dapat dikatakan, siapa yang memiliki kewenangan untuk berbicara, bagaimana sesuatu dapat dikategorikan, serta apa yang kemudian diterima sebagai benar atau sah dalam suatu masyarakat (Syafiuddin, 2018). Oleh karena itu, wacana memiliki hubungan erat dengan kekuasaan karena wacana dapat membentuk cara suatu realitas dipahami sekaligus menentukan batas-batas mengenai apa yang dianggap benar, rasional, normal, dan dapat diterima.

Pemikiran tersebut tampak jelas dalam kuliah inaugurasi Foucault di *Collège de France* pada 2 Desember 1970 yang kemudian diterbitkan dengan judul *L'Ordre du discours* (*The Order of Discourse*). Dalam karya tersebut, Foucault menunjukkan bahwa produksi wacana dalam masyarakat tidak berlangsung secara bebas dan tanpa batas (Kebung, 2020). Produksi wacana selalu berada dalam mekanisme seleksi, pembatasan, pengaturan, dan kontrol tertentu. Dengan kata lain, masyarakat memiliki prosedur yang menentukan wacana mana yang dapat beredar, siapa yang memiliki otoritas untuk mengemukakannya, dan bagaimana suatu pernyataan memperoleh status sebagai pengetahuan yang sah (Bertens, 2004). Pada titik inilah analisis Foucault mengenai wacana mulai berhubungan semakin erat dengan analisis mengenai kuasa.

Pemikiran tersebut merupakan perkembangan dari metode arkeologi pengetahuan yang dikembangkan Foucault dalam *L'Archéologie du savoir* (*The Archaeology of Knowledge*) yang diterbitkan pada 1969. Melalui arkeologi, Foucault tidak berusaha mencari suatu kebenaran universal yang berada di balik sejarah. Sebaliknya, ia berusaha mengidentifikasi kondisi historis yang memungkinkan suatu pengetahuan, konsep, atau pernyataan tertentu muncul dan diterima sebagai sesuatu yang bermakna dalam suatu periode tertentu (Syafiuddin, 2018).

Karena itu, perhatian Foucault diarahkan pada formasi diskursif, yaitu aturan-aturan historis yang memungkinkan pernyataan tertentu muncul, berhubungan satu sama lain, dan membentuk suatu bidang pengetahuan tertentu (Kebung, 2020).

Dalam konteks ini, penting membedakan istilah *connaissance* dan *savoir* yang digunakan Foucault. Keduanya merupakan istilah dalam bahasa Prancis, bukan bahasa Jerman. Secara konseptual, *connaissance* lebih merujuk pada pengetahuan tertentu yang telah teridentifikasi dalam suatu bidang, sedangkan *savoir* menunjuk pada suatu bidang pengetahuan yang lebih luas beserta kondisi historis dan diskursif yang memungkinkan pengetahuan tersebut terbentuk. Pembedaan ini penting karena perhatian Foucault bukan hanya terhadap isi pengetahuan, tetapi juga terhadap aturan historis yang memungkinkan sesuatu dikategorikan, dibicarakan, dan diterima sebagai pengetahuan (Kebung, 1997).

Perkembangan pemikiran Foucault kemudian bergerak dari analisis arkeologis menuju genealogi. Jika arkeologi terutama menyelidiki aturan pembentukan wacana dan pengetahuan, genealogi memberikan perhatian lebih besar pada hubungan antara pengetahuan, kuasa, tubuh, institusi, dan praktik sosial. Genealogi tidak mencari asal-usul suatu fenomena dalam arti mencari titik awal yang murni atau esensial, tetapi menelusuri bagaimana suatu praktik, kategori, atau kebenaran terbentuk melalui proses sejarah yang penuh dengan kontingensi, pertarungan, dan relasi kuasa (Foucault, 1980). Dalam kerangka genealogi tersebut, Foucault mengembangkan pemahaman bahwa kuasa tersebar dan bekerja pada tingkat mikro. Kuasa tidak hanya bekerja melalui hukum, negara, atau institusi politik, tetapi juga melalui hubungan sehari-hari, prosedur administratif, norma, klasifikasi, pengawasan, standar, dan berbagai praktik yang mengarahkan perilaku individu (Kebung, 2020). Oleh karena itu, Foucault menggunakan konsep *micro-power* untuk menunjukkan bahwa kekuasaan dapat bekerja pada tingkat yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kekuasaan tidak selalu tampil dalam bentuk larangan atau kekerasan yang terlihat, tetapi dapat bekerja secara halus melalui mekanisme normalisasi dan pengawasan (Kebung, 2019).

Salah satu bentuk penting dari mekanisme tersebut adalah kekuasaan disipliner (*disciplinary power*). Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menunjukkan bahwa masyarakat modern mengembangkan berbagai teknik untuk mengatur tubuh dan perilaku manusia melalui pengawasan, klasifikasi, penilaian, pelatihan, serta normalisasi (Foucault, 1980). Individu kemudian tidak hanya dikendalikan dari luar, tetapi juga belajar mengawasi dan mengatur dirinya sendiri sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian, kuasa menghasilkan subjek yang mampu menginternalisasi norma dan menyesuaikan perilakunya dengan standar tertentu.

Konsep lain yang penting adalah rezim kebenaran (*regime of truth*). Bagi Foucault, kebenaran tidak dapat dipisahkan begitu saja dari relasi kuasa. Setiap masyarakat memiliki mekanisme tertentu yang menentukan jenis wacana yang dianggap benar, lembaga yang memiliki otoritas untuk menghasilkan dan menyebarkan pengetahuan, serta prosedur yang digunakan untuk membedakan pernyataan yang dianggap benar dan salah (Foucault, 1980). Karena itu, persoalan yang penting bukan sekadar mempertanyakan apakah suatu pernyataan benar atau salah, melainkan bagaimana suatu pernyataan dapat memperoleh status sebagai kebenaran dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sebagai kebenaran.

Dalam perkembangan berikutnya, Foucault juga memperkenalkan konsep governmentality atau pemerintahan sebagai suatu cara untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui pengaturan perilaku individu dan populasi. Kekuasaan pemerintahan tidak selalu bekerja melalui paksaan langsung, tetapi melalui seperangkat pengetahuan, teknik, kebijakan, statistik, norma, dan strategi yang memungkinkan individu maupun kelompok diarahkan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan tujuan tertentu (Kebung, 2016). Dalam pengertian ini, pemerintah tidak hanya mengatur masyarakat dari luar, tetapi juga membentuk kondisi agar masyarakat mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri.

Hal yang juga penting dalam pemikiran Foucault adalah bahwa di mana terdapat relasi kuasa, di situ pula terdapat kemungkinan resistensi. Resistensi bukan sesuatu yang berada sepenuhnya di luar kekuasaan, melainkan muncul di dalam jaringan relasi kuasa itu sendiri (Foucault, 1980). Dengan demikian, hubungan kuasa tidak pernah sepenuhnya bersifat satu arah dan tidak pernah bersifat mutlak. Selalu terdapat kemungkinan negosiasi, penolakan, perlawanan, atau pembentukan praktik alternatif oleh subjek yang berada dalam relasi tersebut. Berdasarkan keseluruhan pemikiran tersebut, relasi kuasa dalam perspektif Foucault dapat dipahami sebagai jaringan hubungan yang bekerja melalui wacana, pengetahuan, institusi, norma, praktik, pengawasan, dan mekanisme pengaturan perilaku untuk membentuk subjek dan menentukan apa yang dianggap benar, normal, sah, dan dapat dilakukan dalam suatu ruang sosial tertentu. Kuasa dengan demikian tidak hanya berfungsi membatasi tindakan, tetapi juga menghasilkan realitas sosial tertentu.

Relasi Kuasa dan Eksklusi Ruang dalam Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo

Pembangunan pariwisata di Labuan Bajo telah membawa perubahan yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan ruang hidup masyarakat lokal (Bagung, 2022). Peningkatan jumlah wisatawan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan hotel, restoran, serta masuknya investasi menunjukkan bahwa ruang Labuan Bajo semakin diarahkan untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata (Idris & Destari, 2019). Namun, pertumbuhan

tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan manfaat bagi masyarakat lokal. Kiwang & Arif (2020) misalnya, menemukan adanya perubahan terhadap kenyamanan, pola kehidupan, budaya, mata pencaharian, serta akses masyarakat terhadap ruang dan sumber daya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya dapat dipahami sebagai proses ekonomi, tetapi juga sebagai proses produksi ruang. Ruang Labuan Bajo yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk tempat tinggal, bekerja, dan menjalankan aktivitas sosial secara perlahan mengalami perubahan fungsi menjadi ruang ekonomi dan konsumsi wisata. Penguasaan tanah oleh investor, meningkatnya nilai properti, pembatasan aktivitas masyarakat di kawasan konservasi, serta berkembangnya ruang-ruang komersial menunjukkan adanya perubahan dalam pola penguasaan dan pemanfaatan ruang (DA, 2022). Dengan demikian, pembangunan pariwisata menghasilkan ruang yang tidak sepenuhnya netral karena di dalamnya terdapat kepentingan dan relasi kekuasaan antara pemerintah, investor, pelaku industri, dan masyarakat lokal.

Dalam perspektif Michel Foucault, kuasa tidak hanya bekerja melalui tindakan represif atau keputusan pemerintah, tetapi melalui jaringan relasi yang melibatkan wacana, pengetahuan, aturan, norma, dan praktik kelembagaan (Kebung, 1997). Dalam konteks Labuan Bajo, wacana mengenai pariwisata berkualitas, investasi, konservasi, modernisasi, dan peningkatan kesejahteraan menjadi dasar yang memberikan legitimasi terhadap arah pembangunan. Wacana tersebut membentuk pemahaman bahwa pengembangan pariwisata merupakan kebutuhan sekaligus jalan menuju kemajuan daerah (Sugar, et al., 2026). Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengubah ruang secara fisik, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.

Relasi *power/knowledge* terlihat ketika pengetahuan dan kebijakan mengenai pariwisata digunakan untuk menentukan bagaimana ruang harus dikelola dan siapa yang dapat memanfaatkannya. Penetapan kawasan konservasi, pengaturan tata ruang, pemberian izin investasi, serta penerapan standar tertentu dalam industri pariwisata merupakan mekanisme yang secara tidak langsung mengatur perilaku masyarakat. Dalam kondisi tersebut, masyarakat lokal dituntut untuk menyesuaikan diri dengan struktur ekonomi baru, termasuk dengan beralih ke pekerjaan yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Kuasa dengan demikian bekerja secara produktif melalui pembentukan aturan, standar, dan pilihan-pilihan yang tersedia bagi masyarakat.

Persoalan tenaga kerja memperlihatkan bentuk lain dari mekanisme tersebut. Industri pariwisata eksklusif membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan standar tertentu. Masyarakat lokal yang memiliki keterbatasan kompetensi dapat mengalami kesulitan untuk

bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah (Sugar, et al., 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa eksklusi tidak selalu terjadi melalui larangan secara langsung, tetapi dapat berlangsung melalui standar kompetensi, profesionalitas, dan kualifikasi yang menentukan siapa yang dianggap layak memperoleh kesempatan dalam industri pariwisata (Koerniawati, 2022).

Melalui konsep *governmentality*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat melalui kebijakan, regulasi, pengetahuan, dan mekanisme ekonomi. Masyarakat tidak selalu dipaksa secara langsung, tetapi diarahkan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan dan industri pariwisata (Bagung, 2022). Pada titik ini, pembangunan menghasilkan subjek yang diharapkan mampu beradaptasi dengan tata ekonomi baru. Masyarakat lokal kemudian tidak hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi juga diarahkan untuk menjadi bagian dari sistem pariwisata melalui pekerjaan, usaha, dan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan destinasi (Bahri & Abdilah, 2022).

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo merupakan proses yang tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan perubahan fisik wilayah, tetapi juga memproduksi ruang melalui relasi kuasa. Relasi tersebut bekerja melalui wacana pembangunan, pengetahuan, regulasi, konservasi, investasi, dan standar industri yang memengaruhi akses masyarakat terhadap ruang dan sumber daya. Akibatnya, sebagian masyarakat lokal berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam memperoleh manfaat pembangunan. Meskipun demikian, sebagaimana dikemukakan Foucault, di dalam setiap relasi kuasa selalu terdapat kemungkinan resistensi (Suyono et al., 2001). Perjuangan masyarakat dalam mempertahankan tanah, mata pencaharian, ruang hidup, dan identitas budaya dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terhadap proses eksklusi yang muncul dalam pembangunan pariwisata.

4. KESIMPULAN

Pembangunan pariwisata eksklusif di Labuan Bajo tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan perubahan fisik wilayah, tetapi juga membentuk relasi kuasa dalam penguasaan dan pemanfaatan ruang. Melalui perspektif Michel Foucault, kuasa bekerja secara produktif melalui wacana pembangunan, pengetahuan, regulasi, konservasi, investasi, dan standar industri yang menentukan bagaimana ruang dikelola serta siapa yang memiliki akses terhadapnya. Proses tersebut berpotensi menghasilkan eksklusi terhadap masyarakat lokal, terutama dalam akses terhadap tanah, sumber daya, mata pencaharian, dan peluang ekonomi. Masyarakat lokal tidak sepenuhnya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menghadapi tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan

struktur pariwisata yang semakin eksklusif. Dengan demikian, pembangunan pariwisata Labuan Bajo perlu diarahkan pada tata kelola yang lebih inklusif dengan memperkuat posisi dan partisipasi masyarakat lokal dalam menentukan penggunaan ruang serta arah pembangunan.

DAFTAR REFERENSI

- Bagung, A. D. D. (2022). *Potret Buram Pembangunan Pariwisata Super Premium Di Labuan Bajo*. The Columnist.
- Bahri, A. S., & Abdilah, F. (2022). Potensi sumber daya manusia bidang pariwisata di kawasan strategis pariwisata nasional Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. *Destinesia: Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 3(2), 84–92.
- Bertens, K. (2004). *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Gramedia Pustaka Utama.
- DA, A. T. (2022). *Jatam: Desain Pariwisata Labuan Bajo Tidak Untuk Kesejahteraan Masyarakat Lokal*. HukumOnline.Com.
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Pantheon.
- Idris, M. H., & Destari, R. (2019). Pengaruh destinasi pariwisata Pulau Komodo terhadap beberapa aspek pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(1), 56–68.
- Kamenparekraf. (2024). *Alasan Menparekraf Fokus Kembangkan 5 Destinasi Super Prioritas*. Kamenparekraf.
- Kebung, K. (1997). Michel Foucault: Parrhesia dan Persoalan mengenai Etika. *Jakarta: Obor*.
- Kebung, K. (2016). MICHEL FOUCAULT DAN “STILISASI DIRI.” *Studia Philosophica et Theologica*, 16(2), 151–163.
- Kebung, K. (2018). Estetika Eksistensi Michel Foucault: Kritik Dan Solusi Alternatif Atas Radikalisme Dan Ekstremisme. *Melintas*, 34(1), 35–59.
- Kebung, K. (2019). Michel Foucault: Subjectivity and Ethics of the Self as Practice of Freedom. *Melintas*, 35(2), 108–121.
- Kebung, K. (2020a). Foucault dan Teologi. *MELINTAS*, 36(3), 276–290.
- Kebung, K. (2020b). Michel Foucault: Sejarahwan Spesifik Masa Kini. *Studia Philosophica et Theologica*, 20(1), 1–13.
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Labuan Bajo Akibat Pembangunan Pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.7290>
- Koerniawati, F. T. (2022). Destinasi wisata, sumber daya manusia pariwisata dan pariwisata berkelanjutan. *Siwayang Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi*, 1(1), 39–50.
- Pinem, M. L. (2020). Kritik Terhadap Epistemologi Barat. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 122–129. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.27984>

- Sugar, F. R., Alfander, A. R., De'e, F., Wora, E. P. G. G., Kawa, S. S., Mage, K., Jalni, C. A., Ovin, A., Klore, F. J. P., & Sam, A. S. (2026). Pembangunan Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dalam Perspektif Development as Freedom Amartya Sen. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 5(1), 211–226.
- Sugar, F. R., Aprilian, P. C., Jalni, C. A., Lagur, Y. K., Nenat, A. A., Kapuka, M. K., Jumardi, R., Wujon, L. F. R., Ngambut, M. B., & Nggajo, F. G. N. (2026). Human Costs dalam Pembangunan Pariwisata Super Premium di Labuan Bajo:(Perspektif Etika Politik Pembangunan Peter L. Berger). *Student Research Journal*, 4(1), 24–36.
- Suyono, S. J., Arwayanti, M., & al-Fahmi, N. (2001). *Tubuh yang rasis: telaah kritis Michel Foucault atas dasar-dasar pembentukan diri kelas menengah Eropa*. Lanskap Zaman.
- Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas pengetahuan (memahami teori relasi kuasa Michel Foucault). *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 18(2), 141–155.
- Taris, N., & Prasetya, A. W. (2024). 423.847 Turis Kunjungi Labuan Bajo Tahun 2023, Turis Asing Terbanyak. Kompas.Com.